

## WAWASAN KEBANGSAAN DALAM BINGKAI SEMANGAT POSTMODERNISME<sup>1</sup>

Oleh: Faizal Yan Aulia<sup>2</sup>

### ABSTRAK

**The** world has started to walk out of the modern age. Dialectics that goes in it also is in transition to change. The answers of modernism is no longer satisfactory and even left a myriad of questions that need to be answered with a new paradigm. Thus, postmodernism appears to try to answer the challenges and obstacles in the postmodern world. Postmodern paradigm may not be the best answer of all the problems, but very helpful in re-examine the responses were deemed obsolete.

**KATA KUNCI:** Wawasan kebangsaan, Postmodernisme

---

<sup>1</sup> Artikel non penelitian

<sup>2</sup> Asisten dosen Fakultas Filsafat UGM

## PENDAHULUAN

Bagi kebanyakan pemikir dunia, era modernisme telah berakhir pada penghujung abad ke-20 yang lalu, dan kini saatnya dunia menapaki jalannya yang baru yaitu jalan postmodernisme. Seperti lazimnya kemunculan aliran-aliran pemikiran sebelumnya, postmodernisme pada dasarnya merupakan reaksi terhadap kegagalan-kegagalan dari modernisme. Kemiskinan, peperangan dan keterbelakangan yang masih juga muncul di mana-mana membuat manusia berpikir ulang mengenai konsep kehidupan dan bagaimana cara terbaik untuk menjalankannya. Optimisme dan ekspektasi yang begitu tinggi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia mulai runtuh seiring dengan tetap munculnya masalah-masalah kemanusiaan.

Modernisme yang dicirikan oleh begitu pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi tidak menjamin terciptanya kehidupan manusia yang harmonis, selaras dan seimbang. Beberapa indikasi menunjukkan modernisme malah menimbulkan masalah lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalitas yang dibarengi dengan penggunaan teknologi tinggi. Penggunaan teknologi dalam mengolah alam tanpa disertai dengan kesadaran akan etika lingkungan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup membahayakan. Pembalakan hutan dengan menggunakan alat-alat canggih dan tanpa kontrol membuat fungsi hutan menjadi terganggu. Akibatnya, fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan penyuplai air bersih

akhirnya berubah menjadi sumber kehancuran bagi manusia itu sendiri. Begitu juga dengan penggunaan pestisida pada masa Revolusi Hijau yang justru meninggalkan masalah baru dalam lahan pertanian yang baru dapat dirasakan dan dilihat secara nyata akhir-akhir ini. Modernisme cenderung menganggap bahwa lingkungan sekitar adalah objek pemuas ego manusia (Majalah Satria , 2009:70)

Peralatan militer yang semakin canggih di satu sisi malah semakin memancing genderang perang. Peralatan-peralatan tersebut baru terbukti keampuhannya kalau sudah dicoba; dan beberapa konflik, peperangan dan bahkan bencana alam disinyalir merupakan ajang uji c persenjataan. Walaupun pendapat ini masih menimbulkan tanda tanya, yang jelas bahwa secara logis perlombaan teknologi persenjataan membutuhkan biaya yang besar dan pastinya si pembuat juga ingin agar persenjataannya dibeli pihak lain sebagai pengganti biaya tersebut. Masalahnya adalah bahwa tidak ada jaminan bahwa senjata tersebut jatuh ke tangan yang 'tepat', selalu terdapat kemungkinan untuk jatuh ke tangan yang 'salah'.

Persenjataan yang dibeli oleh pihak yang 'tidak tepat' inilah yang kemudian dapat mendukung munculnya kriminalitas dan konflik-konflik antar kelompok. Pembobolan rekening bank melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga tidak lepas dari penggunaan teknologi tingkat tinggi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi juga mendorong semakin berkembangnya *cyber crime*, suatu bentuk kejahatan yang sampai saat ini

masih susah untuk diatasi. Pada intinya, inilah residu-residu dari perkembangan pemikiran manusia dalam era modernisme yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat tanpa adanya kontrol etika yang memadai. Sebagai ilmu maka etika berfungsi sebagai pengontrol ilmu-ilmu lain agar tidak menyimpang dari jalur kemanusiaan.

### MELAWAN 'DUNIA MODERN'

Lalu pertanyaannya adalah apa yang salah dalam pandangan modern? Untuk menjawab pertanyaan ini maka harus dicari dulu arti modernisme. Modernisme merupakan paham atau konsep pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju melalui proses modernisasi (Siswomihardjo, 2010). Dalam sejarah pemikiran filsafat Barat dikenal empat zaman/periode pemikiran, yaitu periode Yunani Kuno, Abad Pertengahan, Abad Modern dan Postmodern. Periode Yunani Kuno, yang membentang dari abad ke-6 SM sampai dengan abad 12 M, dicirikan oleh adanya semangat untuk menemukan sebab atau akar dari segala sesuatu, yang dalam istilah Yunani disebut dengan *arche*. Zaman Abad Tengah didominasi oleh kekuasaan agama; dengan kata lain, gereja berperan sebagai aktor utama dalam mengatur masyarakat dan negara. Zaman modern, yang dimulai sekitar abad 15 M sampai abad 19 M, bisa dikatakan sebagai abadnya ilmu-ilmu eksak atau ilmu-ilmu pasti. Fisika, biologi, kimia dan 'saudara-saudaranya' yang lain berkembang pesat dengan ditandai oleh munculnya berbagai penemuan yang spektakuler, dari mesin uap sampai teori heliosentris.

Abad ini didominasi oleh rasio manusia yang berorientasi ke hal-hal yang konkret.

Setelah abad modern 'berakhir', maka dimulailah era baru yang disebut sebagai zaman Postmodern sebagai kelanjutan dan sebuah bentuk perlawanan terhadap zaman sebelumnya. Zaman postmodern dikatakan sebagai kelanjutan zaman modern dalam arti bahwa topik-topik yang muncul dalam abad modern dikomentari dan dikaji kembali. Hal ini kemudian melahirkan kritik-kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dalam zaman Modern. Kritik-kritik inilah yang menyebabkan gerakan-gerakan Postmodern berada pada posisi yang dalam banyak hal bertentangan dengan alur pemikiran modern.

Kondisi seperti ini bukanlah suatu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah pemikiran. Peradaban manusia tidak pernah lepas dari pertentangan-pertentangan antara berbagai macam epistemologi (teori-teori pengetahuan). Model pemikiran yang satu melahirkan model pemikiran yang lain, baik itu yang mendukung maupun yang bertentangan. Sejalan dengan teori Hegel, suatu epistemologi akan melahirkan anti tesisnya dan kemudian memunculkan sintesis. Anti tesis dalam hal ini bisa berupa asumsi-asumsi yang berlawanan atau kritik, dan bisa juga berupa suatu epistemologi. Sintesis yang dihasilkan tentu saja merupakan suatu epistemologi baru. Epistemologi baru ini dalam perkembangannya akan memunculkan anti tesis baru, sehingga epistemologi baru ini tidak dalam posisi sebagai sintesis melainkan telah berubah menjadi tesis. Pada saatnya, dialektika ini

berujung pada sebuah sintesis baru, dan begitu seterusnya.

Menurut Arief Budiman, Postmodernisme adalah aliran pemikiran dan gerakan yang bereaksi terhadap kegagalan manusia menciptakan dunia yang lebih baik (Siswomihardjo, 2010). Tentu saja yang dimaksud adalah kegagalan pemikiran modern dalam menghasilkan sebuah dunia yang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Kegagalan inilah yang memancing para pemikir untuk memikirkan ulang pandangan-pandangan hidupnya berdasar pada kenyataan-kenyataan yang ada.

Perspektif postmodernisme mengandung tiga arah yang berbeda satu sama lain, yaitu nihilisme, fundamentalisme dan postmodernisme konstruktif (Siswomihardjo, 2010). Nihilisme berarti bahwa segala bentuk pandangan dunia itu hanyalah fiksi yang dibuat manusia, oleh sebab itu pandangan dunia tersebut harus dibongkar agar dunia menjadi lebih realistis. Fundamentalisme berarti bahwa kebenaran dan norma yang lebih sehat terdapat dalam dogma/tradisi yang belum tersentuh oleh penafsiran-penafsiran modern. Sedangkan postmodernisme konstruktif berarti nilai-nilai positif modern tetap dihargai (tidak secara frontal ditinggalkan).

Reaksi yang paling kuat dari postmodernisme terhadap modernisme adalah: *Pertama*, bahwa modernisme gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan dramatis sebagaimana diinginkan oleh para pendukungnya yang fanatis. *Kedua*, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas

sebagaimana nampak pada preferensi-preferensi yang seringkali mendahului hasil penelitian. *Ketiga*, bahwa ada semacam kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern. *Keempat*, bahwa ada semacam keyakinan yang sesungguhnya tidak berdasar; bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia dan lingkungannya yang ternyata keyakinan itu keliru manakala kita menyaksikan bahwa kelaparan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan terus terjadi menyertai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kelima*, bahwa ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis, metafisis, eksistensi manusia karena mereka terlalu menekankan pada atribut fisik individu (Siswomihardjo, 2010)

Kelima hal inilah yang dianggap sebagai 'kesalahan' modernisme. Pada intinya, pendewaan terhadap ilmu dan teknologi dianggap telah menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran, dan sekaranglah saatnya untuk memikirkan kembali langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindarkan manusia dari jurang kehancuran tersebut. Maka dari itu, pemikiran dan gerakan postmodern tampil untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui berbagai cara dan metode.

#### **PENGHARGAAN AKAN PERBEDAAN: SEMANGAT POSTMODERN**

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara salah satu semangat postmodern yang patut diperhatikan adalah penghargaan yang tinggi akan perbedaan-perbedaan. Hal ini menjadi

penting tat kala kita kaitkan dengan kondisi atau realitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah suatu masyarakat yang berkomposisi majemuk, baik itu dalam hal kesukuan, keagamaan maupun pandangan hidup. Kondisi masyarakat seperti ini membuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh postmodernisme menjadi relevan.

Bagi pemikiran postmodern, perbedaan itu merupakan suatu 'anugerah' yang layak dihargai dan dijunjung tinggi. Perbedaan tidak identik dengan perpecahan dan kekacauan. Tesis ini yang perlu dikedepankan dalam menghadapi kenyataan masyarakat Indonesia yang plural. Ketika perbedaan itu tidak identik dengan perpecahan atau kekacauan maka jika perpecahan atau kekacauan itu terjadi maka hal ini bukanlah konsekuensi logis dari perbedaan. Artinya, bahwa ada jalan untuk mengelola atau mengolah perbedaan itu agar jangan sampai berujung perpecahan, bahkan kalau bisa perbedaan itu akan diarahkan menuju persatuan; idealnya memang seperti itu.

Analogi sederhana dari pemikiran seperti ini adalah mesin. Apapun bentuk dan jenis mesin itu pastilah terdiri dari berbagai macam komponen. Komponen-komponen yang berbeda-beda itu disatukan atau dirangkai membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai mesin. Mesin tidak akan pernah terbentuk kalau komponennya sama semua. Justru dari komponen yang berbeda-beda itu maka mesin dapat terwujud dan memiliki fungsi yang baru. Kalau komponen itu berdiri sendiri-sendiri maka fungsi atau kegunaannya akan terbatas.

Sebagai negara multi-etnik, multikultur dan multi agama maka keberagaman yang dimiliki Indonesia akan menjadi faktor yang memperlemah ketahanan negara apabila tidak dikelola secara baik dan hati-hati (Majalah Satria, 2008:48). Dibutuhkan usaha ekstra keras dan terus menerus agar perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi bumerang dalam kehidupan bernegara. Perbedaan itu harus dianggap sebagai potensi untuk mengembangkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kasus Ahmadiyah misalnya, perbedaan yang terjadi seharusnya tidak menjadi sumber konflik, apalagi konflik itu sudah pada taraf konflik fisik. Pihak-pihak yang saling berbeda pendapat harus menahan diri untuk tidak saling menyerang secara fisik. Komunikasi antar keduanya harus terus terjalin dengan baik. Pokok-pokok permasalahan yang diperdebatkan memang telah menyentuh dasar keyakinan seseorang. Akan tetapi, tidak selayaknyalah alasan-alasan agama menjadi pembenar tindakan kekerasan.

Dalam untaian semangat postmodern, konflik ini bisa diatasi kalau masing-masing memiliki kesadaran akan perbedaan-perbedaan yang sudah merupakan kodrat manusia; berbeda itu indah. Sebagai minoritas, Ahmadiyah dituntut untuk sadar bahwa dalam hal tertentu mereka berbeda dengan golongan mayoritas, sehingga mereka harus mau dengan penuh kesadaran untuk menurunkan derajat tuntutan dan harapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan bagi mayoritas, harus mau dengan penuh kesadaran menghargai adanya

kelompok-kelompok yang berbeda dan bahkan kalau bisa membimbing dan melindungi. Kiranya jalan keluar atau solusi terbaik dalam kasus ini, seperti yang sering dilontarkan, adalah bahwa Ahmadiyah dianggap sebagai agama baru atau sekte non-Islam seperti yang berlaku di Pakistan. Memang butuh kesadaran yang lebih tinggi dari pihak Ahmadiyah sebagai golongan minoritas, dan sedikit berbau paksaan. Akan tetapi, sedikit paksaan ini diperlukan mengingat kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang belum mencapai taraf kesadaran penuh. Bagi Ahmadiyah memang hal ini dirasa sangat berat karena sudah menyentuh dasar-dasar keyakinannya. Namun, kelangsungan hidup mereka akan terancam jika mereka tetap teguh pada pendiriannya. Ahmadiyah harus *legowo* menerima kenyataan bahwa mereka merupakan pihak yang lemah. Satu hal yang patut untuk dipertimbangkan oleh Ahmadiyah, yaitu bahwa Tuhan tidak butuh nama akan tetapi butuh keikhlasan; 'apalah arti sebuah nama', begitu ungkapan penyair Barat yang masih sering disebut sampai saat ini.

Konflik kesukuan yang masih saja terjadi, meskipun tidak dalam frekuensi yang membahayakan, di bumi Indonesia juga harus mendapat perhatian dari semua pihak. Perbedaan secara fisik, bahasa maupun budaya harus dimaknai sebagai potensi untuk mengembangkan kehidupan berbangsa ke arah yang lebih baik. Multikulturalisme atau paradigma multikultur harus senantiasa ditanamkan pada diri setiap orang dalam bangunan masyarakat yang bersifat majemuk. Kepentingan-kepentingan sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut

ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan nasional. Artinya, bahwa kepentingan nasional (bangsa) lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan yang bersifat kedaerahan maupun kesukuan ketika terjadi benturan kepentingan.

Anthony D. Smith dalam bukunya yang berjudul "Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah" menyatakan bahwa multikulturalisme yang murni hanya dapat muncul di dalam bingkai kerja bangsa jamak (plural), yang menyenangkan perbedaan dan mencakupkan komponen-komponen budaya yang berlainan itu dalam rentangan institusi politik dan simbol negara nasional (2003:52). Pernyataan ini menyiratkan bahwa kerjasama dalam masyarakat yang majemuk hanya akan tercapai apabila masing-masing bagian penyusunnya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sebagai wadah dan tujuan bersama. Wadah dan tujuan bersama ini terangkai dalam konsep bangsa (*nation*), dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) juga harus memperhatikan kepentingan nasional yang luas. Otonomi daerah jangan diartikan sebagai kekuasaan penuh untuk mengelola potensi-potensi daerah tanpa memperhatikan kondisi daerah lain. Perbedaan-perbedaan potensi yang ada di daerah seharusnya menjadi pendorong bagi tiap daerah untuk saling membantu. Prinsip keadilan diterapkan dalam bingkai kehidupan berbangsa, yaitu mengabdikan pada kepentingan nasional dan kemanusiaan. Daerah-daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam tidak boleh semena-mena

dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut, artinya bahwa penggunaan kekayaan alam tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan daerahnya sendiri akan tetapi juga harus berorientasi pada kepentingan bangsa.

Dalam UUD 1945 juga telah disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang juga dimaknai sumber daya alam strategis, diselenggarakan oleh negara (dan bukan daerah) dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (tentunya rakyat Indonesia secara keseluruhan). Prinsip ini harus dipegang teguh oleh kepala-kepala daerah dan legislatif tingkat daerah jika akan membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya. Akan lebih baik lagi apabila menjangkau segenap potensi yang ada di daerah-daerah, sehingga memiliki sumbangsih yang berarti bagi kepentingan nasional. Prinsip keadilan, kemanusiaan dan pengakuan akan perbedaan potensi di daerah-daerah seharusnya menjadi pegangan dalam merumuskan kebijakan daerah yang berorientasi nasional.

#### **NASIONALISME: BUAH KESADARAN KOLEKTIF AKAN PERBEDAAN?**

Semangat dunia postmodern perlu kita apresiasi dan terapkan dalam memupuk wawasan kebangsaan. Pengakuan dan penghargaan akan perbedaan-perbedaan mendorong tiap individu untuk mencari dan menemukan dirinya berada di mana dalam konteks hubungan-hubungan yang lebih luas. Kesadaran akan diri dan lingkungannya

iniilah yang merupakan sisi-sisi psikologis dari nasionalisme sebagai hasil pencarian jati diri. Hegel menyatakan bahwa nasionalisme merupakan jawaban atas keinginan manusia untuk menemukan tempatnya di dunia dan untuk menjadi bagian dari suatu badan kolektif yang lebih kuat yaitu bangsa (Popper, 2008:327).

Pencapaian kesadaran ini tidak akan terwujud apabila masing-masing individu masih tersu mempertahankan ego pribadinya. Perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya hanya akan dimaknai sebagai bertentangan dengan dirinya apabila pola pikir seperti ini masih dipertahankan. Nasionalisme akan semakin menguat jika individu berpikir sebaliknya, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan itu merupakan potensi untuk mengembangkan kehidupan menuju ke arah yang lebih baik; dirinya serta individu-individu lain adalah bagian tak terpisahkan dari suatu kehidupan kolektif. Perbedaan-perbedaan itu penting, dan bahkan mutlak perlu, dalam kehidupan bersama.

Nasionalisme akan runtuh jika perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat masih dianggap sebagai batu sandungan dalam menciptakan sebuah masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang. Perbedaan akan selalu bertolak belakang dengan kesatuan, akan tetapi perbedaan dapat diarahkan menuju persatuan. Prinsip inilah yang perlu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa, bahwa tidak mungkin untuk menciptakan kesatuan mutlak dalam segala hal akan tetapi sangat mungkin untuk menciptakan persatuan di atas segala perbedaan-perbedaan itu. Sesuatu yang berbeda jangan dipaksa untuk

menjadi sama jika tidak ingin perbedaan itu menjadi bom waktu yang siap meledak suatu saat. Akan tetapi, hal-hal yang berbeda itu harus diarahkan untuk saling bekerjasama dan saling melengkapi.

Selain analogi mesin di atas tadi, ada lagi analogi lain yang membantu kita untuk memahaminya perbedaan yaitu es buah atau es campur. Es buah atau es campur pasti terdiri dari berbagai macam buah. Buah-buah inilah yang membentuk suatu komposisi yang pada akhirnya disebut es buah. Keanekaragaman budaya, agama dan adat istiadat adalah buah-buah tersebut sedangkan es buah atau es campur itu adalah bangsa atau negara Indonesia. Nilai yang didapat dari perpaduan buah-buah ini pastinya akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai buah secara terpisah-pisah. Tujuan yang lebih besar membutuhkan usaha dan pengorbanan yang lebih besar pula.

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak hanya dibangun atas kesamaan visi maupun historis masyarakatnya, namun juga berlandaskan pada keberbedaan yang ada pada tiap-tiap anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, nasionalisme juga dibangun berdasar dan di atas perbedaan-perbedaan. Kesadaran akan perbedaan potensi-potensi, baik potensi individu maupun potensi alam fisik, dan keragaman budaya inilah yang mendorong kesadaran kolektif untuk saling bekerjasama dalam bingkai yang lebih luas yaitu negara dan bangsa Indonesia. Nasionalisme seperti ini secara jelas bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, akan tetapi merupakan sarana atau instrumen. Sebagai sarana maka

nasionalisme bukanlah tujuan akhir namun masih memiliki arah yang akan dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan nasionalisme Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara singkat dapat diartikan sebagai demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Kondisi masyarakat Indonesia yang plural tidak bisa dikelola melalui penghapusan segala macam perbedaan. Cara ini justru akan berujung pada kekacauan (*chaos*), karena tiap hal yang berbeda itu secara substansi tidak dapat disamakan. Perbedaan akan menjadi potensi kehidupan yang berguna bagi pengembangan masyarakat apabila perbedaan-perbedaan tersebut dihargai dan ditempatkan pada posisi yang semestinya. Inilah semangat postmodern yang perlu untuk direnungkan dalam menghadapi tantangan di dunia yang sudah mulai 'meninggalkan' era modern. Akhirnya, perenungan ini harus diarahkan ke dalam proses internalisasi, yaitu internalisasi semangat postmodern dalam setiap langkah membangun bangsa.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia, F.Y., 2008, *Kesadaran Multikultural sebagai Titik Tolak dalam Menentukan Suatu Kebijakan Politik* dalam Majalah Satria Vol.4 No.4 Oktober-Desember 2008, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Aulia, F.Y., 2009, *Menjaga Ruang Hidup Bangsa* dalam Majalah Satria Vol.5 No.3 Juli-September 2009, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Popper, K.R., 2008, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*, terjemahan: Uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswomihardjo, K.W., 2010, *Postmodernisme*, bahan kuliah, tidak diterbitkan.
- Smith, A.D., 2003, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, terjemahan: Frans Kowa, Erlangga, Jakarta.